

PEREMPUAN BERDAYA TAWAR: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan

Saadah Erma Yeni¹

saadahermayeni@gmail.com

Abstrak: Pada satu periode pergantian estafet kepemimpinan bangsa Indonesia, telah terjadi “inflasi” partisipasi politik perempuan sebesar 0.9%. Penurunan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang telah memberikan kuota sebesar 30% bagi perempuan untuk berpartisipasi di parlemen. Sayangnya, kuota tersebut terbuang sia-sia karena berbagai tantangan yang membelenggu partisipasi politik perempuan. Mulai dari rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, kurangnya kesadaran politik perempuan dan minimnya dukungan keluarga, kentatnya budaya patriarki dan penafsiran yang konservatif terhadap ajaran agama. Peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah pendidikan yang responsif gender, penataan ulang berbagai kebijakan yang selama ini dianggap membelenggu partisipasi politik perempuan dan penafsiran ulang (reinterpretasi) doktrin-doktrin agama yang selama berabad-abad mencerabut hak politik perempuan.

PENDAHULUAN

Grace Natalia, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, menyatakan keprihatinannya soal partisipasi perempuan di bidang politik. Lewat cuitan bertanggal 21 April 2016 di akun *Twitter*-nya, @grace-nat, ia mengkritisi minimnya kader perempuan yang menempati jabatan strategis di partai seperti ketua dan sekretaris. Keprihatinan itu kian besar saat jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 17.3% ([twitter.com](https://twitter.com/grace-nat), 28/06/2016). Persentase ini menunjukkan penurunan partisipasi dari periode sebelumnya sebesar 18.2%. Data ini bermakna bahwa dalam satu periode telah terjadi “inflasi” sebesar 0.9%. Jika penurunan ini terus terjadi pada

¹ Penulis merupakan guru di SMP Muhammadiyah Sintang Kalimantan Barat

periode-periode berikutnya, dikhawatirkan tidak akan ada lagi perempuan yang mampu “duduk” di parlemen.

Data yang dipaparkan di atas seharusnya menjadi lampu merah bagi para perempuan yang katanya peduli nasib perempuan. Mereka yang akrab disapa “pejuang kesetaraan gender” itu mesti berbenah dan mengevaluasi diri. Hal itu dikarenakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah buah perjuangan panjang para feminis. Salah satu perjuangan itu termanifestasi dengan diberikannya kuota sebesar 30% untuk perempuan di parlemen dan partai politik. Sayangnya, representasi perempuan di badan legislatif pada berbagai tingkatan, termasuk DPRD Tingkat II (kabupaten), DPRD Tingkat I (propinsi) dan DPR RI (nasional), masih sangat rendah (Khofifah, 2013:45). Alih-alih menambah porsi kuota, yang terjadi malah penurunan jumlah kursi di parlemen.

Kontras memang. Kaum feminis Indonesia telah berjuang agar perempuan mendapat porsi sebanyak mungkin dalam berbagai bidang kehidupan. Namun fakta berbicara lain meski kesempatan berpartisipasi dan setara dengan kaum laki-laki telah diberikan. Perempuan masih menjadi “katak dalam tempurung”. Ia hanya besar di dunianya sendiri dan kecil saat harus bersaing dengan laki-laki. Hal ini memang bukan 100% salah perempuan, melainkan ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari faktor yang berasal dari diri perempuan sampai pada faktor pemahaman ajaran agama yang konservatif. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengurai upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan agar mampu bersaing dengan laki-laki di ranah politik.

MENCARI “DALANG” KEKALAHAN PEREMPUAN

Partisipasi perempuan dalam politik adalah “jantung hati” dari pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Pendapat Helen Clark (2011:6), administrator di *United Nations Development Programme* itu telah menggugah kesadaran pemimpin di Indonesia. Wujud kesadaran itu dilihat dari peraturan-peraturan yang memberi kemudahan yang pada akhirnya terkesan “memanjakan” perempuan. Salah satunya

tergambar dari UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Pada pasal 55 ditetapkan bahwa susunan bakal calon legislatif yang disusun Parpol harus memuat “paling sedikit” 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, pada pasal 56 ayat 2 disebutkan formula 3:1 di mana dalam setiap 3 orang bakal calon harus ada sekurang-kurangnya 1 bakal calon perempuan. Pointer-pointer ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 pasal 11b, 11d, dan pasal 24.

Sayangnya, kesempatan besar yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai efek perjuangan kaum feminis terbuang sia-sia. Statistik terkini, seperti yang diungkap Grace Natalia sebelumnya, menunjukkan pemubaziran kuota sebesar 12.7%. Persentase ini didapat dari kuota yang ditetapkan yakni 30% lalu dikurangi dengan kuota yang mampu dipenuhi sebesar 17.3%. Interpretasi atas data ini bermuara pada pemahaman bahwa kaum feminis telah kecolongan. Mereka terlalu sibuk berjuang “memanjakan” perempuan dengan kuota-kuota tertentu namun lupa mempersenjatai perempuan dengan kapasitas memadai. Alhasil, perempuan masih terus kalah bersaing dari laki-laki.

Banyak analisis bermunculan dalam rangka mencari “dalang” kekalahan perempuan di ranah politik. Yusuf Pambudi (2011:13-20) misalnya. Ia mengatakan ada dua faktor yang memicu kekalahan perempuan yaitu faktor hambatan politik yang “bercokol” dalam sistim politik itu sendiri dan faktor struktural yang terdiri dari hambatan pribadi dan psikologis yang berasal dari dalam diri perempuan, hambatan sosiokultural yang “membelenggu” perempuan untuk tetap bertahan di ranah “dapur, kasur dan sumur” dan hambatan ekonomi yang tidak mau ketinggalan “mengepung” perempuan sampai tidak berkutik.

Lain halnya dengan Khofifah Indar Prawansa (2013:48-49), Menteri Sosial RI itu mengklasifikasikan faktor penyebab kekalahan perempuan di ranah politik secara lebih terperinci. Faktor yang dimaksud adalah faktor budaya di Indonesia yang masih kental dengan asas patriarki. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam

partai politik. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Selain itu, faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan, faktor-faktor keluarga dan sistem multi-partai turut memainkan peranannya.

Nurland dalam Yuni Retnowati (2015:159) turut mengemukakan pandangan seputar penyebab kekalahan perempuan di politik. Ia mengemukakan tiga faktor penyebab, yaitu faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki, pemahaman masyarakat yang konservatif terhadap ajaran agama dan kemunculan hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek kehidupan. Jadi Nurland memandang bahwa negara turut berperan dalam mengukuhkan dominasi laki-laki sebagai “*the first sex*” dan perempuan sebagai “*the second sex*” yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di ranah politik.

Komparasi atas tiga pendapat di atas bermuara pada pemahaman bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi kekalahan perempuan di ranah politik. Faktor yang pertama adalah faktor yang berasal dari diri perempuan itu sendiri, faktor hambatan budaya yang berasaskan patriarki, faktor yang berasal dari sistim politik yang salah dan terakhir, faktor pemahaman dan penafsiran yang konservatif terhadap ajaran agama. Berikut akan diuraikan masing-masing faktor tersebut:

Pertama, faktor yang berasal dari diri perempuan itu sendiri. Faktor ini “dihuni” oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan dan keluarga yang tidak mendukung aktivitas perempuan di luar rumah. Kurangnya rasa percaya diri dari kaum perempuan serta belenggu kodrati yang mengharuskan perempuan berada dalam sebuah kewajiban mengurus rumah tangga, merawat keluarga, serta pekerjaan domestik lainnya membuat perempuan menjadi ragu untuk berkontestasi dalam politik (Yusuf Pambudi, 2011:18). Hambatan ini kian terasa saat perempuan yang sudah

berkeluarga sulit mendapatkan izin dari pasangan, menjadi “jalan buntu” yang mengurung perempuan di ranah “dapur, kasur dan sumur” belaka (Khofifah, 2013:48).

Kedua, faktor hambatan budaya yang telah diwariskan turun temurun dan dilanggengkan oleh masyarakat. Konteks budaya di Indonesia masih sangat kental dengan azas patriarki (Yuni Retnowati, 2015:160). Amina Wadud (1999:80) mendefinisikan patriarki sebagai berikut: “*It was a culture with an androcentric bias, one where the male and the male experience are looked upon as the norm*”. Amina Wadud memahami patriarki sebagai budaya yang diwarnai bias gender, di mana laki-laki dan pengalamannya dipandang sebagai norma yang mengatur kehidupan. Alhasil, konstruksi yang tidak proporsional itu, kemudian melahirkan doktrin bahwa perempuan tabu berpolitik.

Ketiga, faktor hambatan politik yang “bercokol” dalam sistim politik itu sendiri. Hambatan politik yang “membunuh” partisipasi politik perempuan terlihat dari penetapan calon legislatif, nomor urut dan daerah pemilihan serta penetapan calon terpilih, yang masih bias gender (Yusuf Pambudi, 2011:14). Sistem partai yang didominasi laki-laki telah memberi corak “macho” atau “maskulin” pada partai. Laki-laki bagaikan “aktor utama” yang memainkan peran dalam kancah perpolitikan dan perempuan hanya “figuran” yang melengkapi sepak terjang aktor utama. Alhasil, jarang ditemui keberadaan perempuan yang menjadi pemegang “kunci” kekuasaan strategis di parpol. Kalau pun ada perempuan yang menjadi ketua umum atau sekretaris dan jabatan penting lainnya, itu bisa dihitung dengan jari.

Terakhir, pemahaman dan penafsiran yang konservatif terhadap ajaran agama. M. Quraish Shihab (2007:344-345) mengatakan “sampai memasuki milenium ketiga ini misalnya, masih ada sebagian ulama, cendekiawan, dan kaum Muslim yang memandang negatif tentang peran dan kontribusi positif kaum perempuan dalam ranah politik”. Lebih jauh, pemikiran ulama klasik seperti Al Ghazali juga berbau bias gender. Ia dalam Syafiq Hasyim (Tt:189) misalnya, menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukkan sebagai imam (kepala negara). Argumentasinya,

bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum.

Selain itu, pada banyak kitab tafsir ditemukan penafsiran yang bias gender. Pada tafsir Ibnu Katsir misalnya, Ibnu Katsir (:608) mengatakan bahwa “laki-laki adalah pemimpin perempuan, pembesarnya, hakim atasnya, dan pendidiknya. Karena laki-laki itu lebih utama dan lebih baik”. Kalimat terakhir Ibnu Katsir menunjukkan secara jelas warna “bias gender” pada pendapatnya. Ibnu Katsir secara *frontal* meninggikan kedudukan laki-laki atas perempuan atau dalam kata lain “tidak berkeadilan gender”. Warna bias gender itu kian nyata diperjelas pada kalimat berikutnya “Maka dalam diri lelaki itu ada kelebihan dan keutamaan atas perempuan, hingga sesualah kalau lelaki itu menjadi pemimpin atas perempuan. Sebagaimana firman Allah Ta’ala: “Dan laki-laki memiliki satu derajat lebih atas perempuan”.

Paparan mengenai “dalang” kekalahan perempuan di ranah politik di atas, “mendudukan” masalah bahwa partisipasi perempuan harus “digenjot”. Artinya, segala hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi harus diberantas. Hambatan yang berasal dari diri perempuan, sistim politik, budaya yang berlaku sampai pada penafsiran yang frontal terhadap ajaran agama mesti “dimusnahkan”. Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang mampu mengatasi berbagai belenggu yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah politik. Upaya tersebut akan dibahas dalam uraian berikut.

MENGEKSEKUSI “DALANG” KEKALAHAN PEREMPUAN

Rendahnya kapasitas personal perempuan, minimnya dukungan keluarga, kentalnya budaya patriarki, warna politik yang “macho” dan penafsiran agama yang frontal telah menjadi dinding penghalang partisipasi politik perempuan. Alhasil, semangat kesetaraan dalam politik yang telah diperjuang feminis dan diusung jauh-jauh hari oleh agama Islam tidak terejawantahkan. Padahal Islam sebagai agama yang

berkeadilan gender telah menggariskan bahwa perempuan boleh berpolitik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At Taubah:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kata *awliya'* dalam ayat ini berarti kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan frase *amar ma'ruf nahy munkar* mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa (Shihab, 1997:273). Artinya, Islam memberikan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan untuk berbuat *ma'ruf* (kebaikan) dan mencegah *munkar* (Abu Syuqqah, 1997: 69). Lebih jauh, Musda Mulia (2007:146) menegaskan bahwa ayat ini berbicara tentang kesamaan hak-hak politik perempuan dan laki-laki.

Atas dasar itu, semua “dalang” kekalahan yang menghalangi partisipasi politik perempuan harus “dieksekusi”. Proses eksekusi itu membutuhkan kampanye jangka panjang dalam lingkup nasional sehingga berbagai hambatan dapat dientaskan. Sebuah kampanye peningkatan kesadaran publik yang dirancang dengan baik perlu diluncurkan melalui media masa dan organisasi masyarakat sipil agar dapat membawa perubahan terhadap pola pikir tradisional terkait dengan peran perempuan di ranah politik dan pemerintahan. Kampanye kesadaran publik harus menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai sasaran, karena perempuan seringkali menginternalisasi ideologi peran gender dan juga meyakini stereotip gender yang dilekatkan pada mereka.

Kampanye media dapat dilancarkan melalui media cetak dan elektronik dan dengan menggunakan berbagai alat bantu seperti poster, baliho, stiker dan pin-pin bergambar. Kampanye yang akan dilakukan bertujuan untuk 1) meningkatkan kesadaran publik tentang isu representasi politik perempuan 2) menggalang dukungan publik untuk kebijakan kesetaraan gender 3) Memberikan tekanan pada parlemen untuk mengesahkan produk hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Strategi-strategi kampanye media lainnya yang efektif adalah dengan menggelar diskusi dengan sejumlah peserta di kota-kota besar, dan mengaitkan kegiatan itu dengan acara-acara besar lainnya yang menarik perhatian publik.

Substansi dan wujud nyata kampanye kesadaran publik itu harus memuat nilai-nilai pendidikan responsif gender untuk mengeksekusi hambatan yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri dan hambatan budaya patriarki yang menggurita. Hambatan yang berasal dari sistem politik yang maskulin dieksekusi dengan rekonstruksi kebijakan publik dan penafsiran ajaran agama yang konservatif dieksekusi dengan reinterpretasi doktrin agama. Berikut ini akan dibahas masing-masing proses eksekusi tersebut:

Pertama, rekonstruksi pendidikan responsif gender. Pendidikan dan politik memiliki keterkaitan yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Pendidikan adalah agen sosialisasi politik yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik perempuan. Sejarah membuktikan betapa pendidikan memiliki peran besar dalam peningkatan partisipasi politik. Di Timur Tengah misalnya, banyak madrasah yang disponsori oleh penguasa politik. Nizam Al Mulk, seorang wazir Dinasti Saljuk pada tahun 1064 mendirikan Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Sebuah madrasah sebuah madrasah yang salah satu guru besarnya pemikir dan ulama besar, Imam al-Ghazali (Azyumardi Azra, 1996:Th).

Pendidikan politik yang responsif gender diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan. Kepercayaan terhadap kemampuan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi

anggota parlemen atau posisi politik lain yang strategis. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik bukan hanya domain laki-laki saja melainkan terbuka bagi semua warga negara termasuk perempuan. Pendidikan responsif gender juga harus menekankan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik sehingga tidak ada yang perlu ditakuti perempuan.

Kedua, rekonstruksi kebijakan publik. Bagaimana perempuan berpartisipasi dalam partai politik dan bagaimana partai mendorong dan memperluas keikutsertaan perempuan dan mencakup isu kesetaraan gender merupakan penentu utama peningkatan partisipasi politik perempuan. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang mampu mendorong keterlibatan perempuan dalam proses politik. Strategi ini diharapkan bisa efektif dan dikaitkan dengan langkah yang diambil partai pada fase tertentu dalam siklus pemilihan yang mencakup fase pra pemilihan, fase pemilihan, dan fase pasca pemilihan.

Strategi yang bisa dilakukan untuk “menggenjot” partisipasi politik perempuan adalah 1) penetapan kriteria rekrutmen anggota parpol yang ‘bersahabat’ terhadap perempuan. Kriteria tersebut harus transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Kebijakan tentang berbagai tindakan tegas dalam proses pemilihan pimpinan partai. 3) Kebijakan *affirmative action* dalam proses nominasi anggota parlemen di tingkat nasional dan lokal. 4) Pemberlakuan sistem pemilihan dengan representasi proporsional, bukan sistem yang mengadopsi metode “*first-past-the-post*,” atau distrik pemilihan dengan calon tunggal yang dominan. Dan 5) pemberlakuan metode ‘*zipping*’ yakni penulisan nama-nama kandidat perempuan dan laki-laki secara bergantian (berselang-seling) dalam daftar caleg dan di lembar kertas suara (Ani Soetjipto, 2003:13).

Selain strategi di atas, pengembangan jaringan-jaringan organisasi perempuan dan penciptaan sinergi usaha juga urgen untuk mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan baik yang sudah “duduk” atau yang sedang berjuang mendapatkan “kursi” untuk duduk di parlemen. Selain itu dibutuhkan upaya yang bisa mendorong

perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai. Lalu perlu adanya advokasi terhadap parpol untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen karena mayoritas pemilih di Indonesia adalah perempuan.

Ketiga, reinterpretasi doktrin agama. Faktor utama penyebab terpuruknya posisi perempuan dalam bidang politik adalah penafsiran agama yang sengaja dikonstruksikan oleh para pemilik otoritas agama, bukan faktor ajaran agama itu sendiri.. Padahal Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan dari kelompok Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-dalil al-Qur'an tentang konsep 'adalah (keadilan) dan musawah (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam (Hasyim, Th:192).

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya harus dimulai dengan merevisi penafsiran melalui ijtihad. Umat Islam hampir sepakat bahwa ijtihad dalam arti pembaruan penafsiran atau reinterpretasi ajaran Islam adalah suatu kebutuhan dasar. Meskipun al-Qur'an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak abadi. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab fikih merupakan bukti positif kerelatifan tafsir. Perlu dipahami bahwa seorang *mufassir*, seobyektif apapun dia sulit melepaskan diri dari hukum-hukum dan tradisi yang berkembang pada masa di mana dia hidup. Demikian halnya dengan para ahli fiqh (*fuqahā*). Karena itu, perlu peninjauan ulang terhadap paham-paham fikih klasik agar selaras dengan kebutuhan masa kini.

Sepanjang paparan mengenai eksekusi dalang kekalahan perempuan bermuara pada pemahaman bahwa banyak usaha yang dapat dilakukan untuk “menggenjot” partisipasi politik perempuan Indonesia yang masih minim. Usaha tersebut ditujukan untuk mengatasi “dalang-dalang” yang memicu kekalahan perempuan dalam bersaing

dengan laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kampanye nasional berjangka panjang untuk menggugah partisipasi politik perempuan. Kampanye tersebut berisikan usaha menumbuhkembangkan kesadaran politik perempuan. Usaha tersebut berwujud pendidikan politik yang responsif gender, rekonstruksi kebijakan publik dan reinterpretasi doktrin agama.

PENUTUP

Pada satu periode pergantian estafet kepemimpinan bangsa Indonesia, telah terjadi “inflasi” partisipasi politik perempuan sebesar 0.9%. Persentase ini diperoleh dari kalkulasi jumlah perempuan yang mampu “bertahta” di parlemen. Data ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang telah memberikan kuota sebesar 30% bagi perempuan untuk “duduk” di parlemen. Sayangnya, kuota tersebut terbuang sia-sia karena berbagai hambatan yang membelenggu perempuan untuk dapat mengecap hak politiknya. Alhasil, ketidakmampuan perempuan memenuhi kuota parlemen mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan masih rendah.

Ada banyak faktor yang dicurigai sebagai “dalang” rendahnya partisipasi politik perempuan. Faktor rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, kurangnya kesadaran politik perempuan dan minimnya dukungan keluarga (hambatan yang berasal dari dalam diri perempuan sendiri) menjadi “aktor utama” yang mempecundangi perempuan. Kentalnya budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia turut mencerabut partisipasi politik perempuan. Belum lagi hambatan yang berasal dari sistim politik itu sendiri. Budaya partai yang terkesan “macho” memberi kesan bahwa politik hanya untuk laki-laki dan perempuan pantang untuk berpartisipasi. Lalu penafsiran yang konservatif terhadap ajaran agama turut memasung perempuan hingga tidak berkutik.

Atas dasar itu, diperlukan suatu upaya praktis yang bisa “mengeksekusi” dalang kekalahan perempuan. Upaya tersebut adalah “kampanye nasional partisipasi politik perempuan”. Pada kampanye berjangka panjang dan berkesinambungan itu, diberikan

pendidikan yang responsif gender, penataan ulang berbagai kebijakan yang selama ini dianggap membelenggu partisipasi politik perempuan dan penafsiran ulang (reinterpretasi) doktrin-doktrin agama yang selama berabad-abad mencerabut hak politik perempuan. Proses kampanye itu melibatkan seluruh komponen bangsa, terutama media. Apakah itu media cetak atau elektronik. Berbagai alat bantu seperti poster, baliho, stiker dan pin-pin bergambar dikerahkan demi peningkatan partisipasi politik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah. 1997. *Kebebasan Perempuan* Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Amina Wadud. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press
- Azzumardy Azra. 1996. *Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam*. Disampaikan dalam “Seminar Nasional Peranan pendidikan Islam dalam pendidikan politik di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo pada tanggal 19 – 21 Mei 1996 di Hotel Dibia Puri Semarang.
- Khofifah Indar Parawansa. 2013. *Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia* (online). Tersedia di: www.idea.int/publications/wip/upload/CS-Indonesia.pdf, diakses tanggal 26 Juni 2016
- Muhammad Bukhari Lubis. 2006. *Argumen Kesetaraan Gender - Perspektif Al-Quran: Satu Ulasan*. Malaysia: Sari
- Musda Mulia. 2008. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Kibar Press
- M. Quraish Shihab. 2007. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3*. Jakarta: Lentera Hati
- M. Quraish Shihab. 2007. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati
- M. Quraish Shihab. 1997. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013
- UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD
- Yuni Retnowati. 2015. *Hambatan Budaya terhadap Partisipasi Politik Perempuan* (online). Tersedia di: <http://akindo.ac.id/downlot.php?file=95Hambatan%20Budaya%20Terhadap%20Partisipasi%20Perempuan.pdf>, diakses tanggal 26 Juni 2016)